

PENGARUH BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL TERHADAP EKUITAS DANA (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kota Palu)

Nurhaeni

nurhaenithamrin@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims to explore and determine the relationship between goods and services expenditures, capital expenditures, and equity funds. It also determines both simultaneous and partial impacts of goods and services, and capital expenditures on equity funds. Sample in this research consists of 33 governmental institutions in palu city, which is selected through purposive sampling technique, or selection based on 'judgment'. The data analyzed quantitatively with multiple linear regressions analysis. The result indicates that equity funds decreased due to spending on good and service and capital during one accounting period. Simultaneous test shows that good and service, and capital expenditure have significant impact on equity funds in 33 govermental institutions. While partial test evidences that espenditures partially have significant impact on equity funds in 33 govermental institutions in palu. Coefficient determinant shows adjusted R-Square value of 0,782 that indicates that 78,20% of equity funds impacted by spending on goods and service, capital, while the remining of 21,80% is impacted by other variables that are not studied.

Keywords: *goods and services expenditure, capital expenidtures, and equi funds.*

Reformasi keuangan daerah ditandai dengan diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menggantikan UU nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antar Negara dengan daerah - daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri, berturut-turut Keuangan daerah di era prareformasi dan di era (pasca) reformasi memiliki ciri yang berbeda.

Halim dalam bukunya akuntansi sektor Publik: akuntansi keuangan daerah (2007:8), Sejalan dengan diterbitkannya paket UU tentang Keuangan Negara, yakni UU nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, maka sebagai konsekuensinya adalah penyesuaian dan amandemen atas peraturan perundangan sebelumnya. Dalam

kaitan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkan UU Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU nomor 25 tahun 1999. Selain itu, muncul pula peraturan perundangan yang diamanatkan oleh UU terdahulu, seperti PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintahan.

Mamesah dalam Halim (2007:23) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala

prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penetapan prioritas prioritas tersebut beserta upaya pencapaiannya merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, daerah harus memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.

Laporan keuangan yang harus dihasilkan Pemda menurut PP nomor 24 tahun 2005 adalah laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Untuk menyusun neraca, terlebih dahulu harus disusun laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Semua jenis laporan tersebut terdiri atas elemen-elemen yang disebut dengan rekening. Rekening merupakan kumpulan informasi yang sejenis dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Perkembangan Realisasi Belanja Barang dan jasa, dan Belanja Modal tahun 2014 untuk SKPD se-Kota Palu; 2) secara simultan pengaruh realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terhadap Ekuitas Dana; 3) Secara parsial pengaruh realisasi Belanja Barang dan Jasa terhadap Ekuitas Dana.

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka hipotesis yang dalam penelitian ini adalah:

1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Ekuitas Dana SKPD se-kota palu.
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Ekuitas Dana SKPD se-kota palu.
3. Realisasi Belanja Modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Ekuitas Dana.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Verifikatif. Penelitian verifikatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel dengan menggunakan analisis data bersifat statistik agar dapat menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2013:8). Jadi penelitian ini berupaya menguji jawaban masalah atau hasil pemikiran yang kebenarannya bersifat sementara (hipotesis).

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan pertimbangan atau sesuai dengan tujuan penelitian. Dari 33 SKPD yang ada di Kota Palu, sebagian kantor Kecamatan dan kantor kelurahan tidak termasuk dalam sampel dengan pertimbangan : 1) jumlah pagu Anggaran diatas 1,5 Milyar; 2) Anggaran bersifat Pelayanan dan Administratif; 3) Ketergantungan Penyusunan laporan Keuangan yang tinggi pada PPKAD; 4) peranan Kompetensi kualitas staf dalam rangka perbaikan laporan keuangan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Variabel bebas (Independen) yang terdiri dari: Belanja Barang dan Jasa (X_1) dan Belanja Modal (X_2) serta Variabel terikat yaitu Ekuitas Dana (Y). Defenisi Operasioanal masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa (X_1) merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan bersifat rutin karena terjadi terus-menerus.
2. Belanja Modal (X_2) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi mamfaat lebih dari satu periode Akuntansi.
3. Ekuitas dana (Y) dapat di kelompokkan sebagai berikut:
 - a. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

- b. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui Wawancara, Observasi atau pengamatan, dan Dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas.

2. Uji Regresi Berganda

Mengetahui pengaruh Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap Ekuitas Dana SKPD se-Kota Palu maka Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (multiple regression) Data diolah dengan bantuan *software* SPSS.

Setiaji, 2004 dalam idhamsyah, (2011:49) Model regresi linear berganda tersebut diatas bila diterapkan dalam model penelitian ini akan nampak sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Ekuitas Dana

b_0 = Konstanta (Intercep)

X_1 = Alokasi Belanja Barang dan Jasa

X_2 = Alokasi Belanja Modal

e = Kesalahan Pengganggu (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Belanja Barang dan Jasa

Realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup realisasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2014 pada 33 SKPD yang mencakup 15 Dinas, 9 Badan, 1 rumah sakit, dan 8 kantor yang ada di SKPD Kota Palu.

Tabel 1. Belanja barang dan jasa

No.	Nama SKPD	Belanja Barang dan Jasa		Persentase Capaian (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Dinas Pendidikan	11.063.757.549	10.122.685.972	91,49
2	Dinas Kesehatan	18.675.818.535	16.528.455.818	88,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	78.629.638.101	77.089.700.984	98,04
4	Dinas Pekerjaan Umum	11.406.818.050	10.997.218.002	96,41
5	Dinas Penataan Ruang dan Perumahan	2.526.347.000	2.361.028.450	93,46
6	Dinas Pemadam Kebakaran	2.062.511.600	2.062.207.780	99,99
7	Bappeda dan Penanam Modal	6.352.412.530	5.942.894.199	93,55
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.120.578.865	4.016.372.961	97,47
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	8.299.027.400	7.897.798.980	95,17
10	Badan Lingkungan Hidup	2.894.965.604	2.828.918.454	97,72
11	Dinas Kependudukan dan Capil	1.156.390.175	1.127.790.751	97,53
12	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2.706.221.900	2.646.018.825	97,78
13	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	1.953.761.500	1.950.939.551	99,86
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.132.790.000	2.056.723.211	96,43
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.259.857.000	1.138.029.109	90,33
16	Satuan Polisi Pamong Praja	3.208.079.700	3.160.064.340	98,50
17	Sekretariat Daerah	30.472.046.747	27.902.212.029	91,57
18	Sekretariat DPRD	23.190.203.550	21.701.065.050	93,58
19	DPPKAD	25.840.309.973	24.929.617.994	96,48
20	Inspektorat	1.654.503.600	1.646.192.655	99,50
21	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	1.394.238.828	1.356.136.381	97,27
22	Badan Kepegawaian Daerah	5.926.027.900	5.622.373.062	94,88
23	Kecamatan Palu Selatan	194.985.000	187.560.418	96,19
24	Kecamatan Palu Barat	459.126.000	449.281.724	97,86
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.423.084.625	1.381.583.140	97,08
26	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	913.380.425	833.147.177	91,22
27	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	2.354.221.055	2.317.890.760	98,46
28	Badan Pemberdayaan Masyarakat	13.317.124.050	13.236.068.030	99,39
29	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	600.066.000	544.325.833	90,71
30	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan	6.115.368.835	6.041.332.383	98,79
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	875.640.100	773.614.226	88,35
32	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.936.831.825	2.901.137.229	98,78
33	Dinas Perindagkop dan Usaha Kecil Menengah	6.235.514.873	5.335.696.969	85,57
Rata-rata		8.556.110.573	8.154.123.711	95,39

Sumber : Data Diolah, 2014

Deskripsi Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup realisasi anggaran belanja modal satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota palu tahun 2014 pada 33 SKPD yang mencakup 15 Dinas, 9 Badan, 1 Rumah sakit, dan 8 kantor yang ada di SKPD Kota Palu. Persentase capaian realisasi yang rendah pada Unit-unit Kerja dikarenakan adanya penawaran belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya kepada pihak ketiga. seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Belanja Modal

No.	Nama SKPD	Belanja Modal		Persentase Capaian (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Dinas Pendidikan	56.457.185.266	51.514.454.782	91,25
2	Dinas Kesehatan	18.146.654.475	16.418.550.111	90,48
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	31.200.844.050	30.578.183.771	98,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	92.782.156.950	90.588.629.680	97,64
5	Dinas Penataan Ruang dan Perumahan	10.689.421.327	5.799.100.002	54,25
6	Dinas Pemadam Kebakaran	516.438.400	510.357.000	98,82
7	Bappeda dan Penanam Modal	681.980.970	681.470.750	99,93
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.821.782.135	4.810.413.135	99,76
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	7.557.749.100	5.155.814.350	68,22
10	Bappeda dan Penanam Modal	940.697.396	901.788.400	95,86
11	Dinas kependudukan dan Cakil	455.440.825	454.797.000	99,86
12	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1.045.350.100	1.015.835.500	97,18
13	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	270.738.000	270.738.000	100,00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.357.710.000	1.356.524.001	99,91
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	548.850.000	511.343.000	93,17
16	Satuan polisi Pamong Praja	133.050.000	133.050.000	100,00
17	Sekretariat Daerah	25.320.504.823	22.519.729.973	88,94
18	Sekretariat DPRD	4.194.271.450	3.820.444.850	91,09
19	DPPKAD	9.588.024.555	9.431.264.650	98,37
20	Inspektorat	497.276.400	495.184.400	99,58
21	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	489.708.949	479.539.949	97,92
22	Badan Kepegawaian Daerah	558.698.000	553.315.350	99,04
23	Kecamatan Palu Selatan	2.500.000	2.500.000	100,00
24	Kecamatan Palu Barat	31.350.000	31.350.000	100,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	424.566.375	399.474.062	94,09
26	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	19.147.500	19.147.500	100,00
27	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	1.162.186.945	1.118.137.500	96,21
28	Badan Pemberdayaan Masyarakat	364.881.100	358.781.100	98,33
29	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	235.050.000	230.649.950	98,13
30	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan	6.281.696.620	6.235.670.922	99,27
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.521.734.900	1.516.502.900	99,66
32	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	182.371.175	181.771.175	99,67
33	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.007.189.752	9.585.885.481	95,79
Rata-rata		8.742.036.592	8.111.527.250	95,16

Sumber : Data Diolah, 2014

Deskripsi Ekuitas Dana

Ekuitas dana yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup ekuitas dana satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota palu tahun 2013 dan tahun 2014 pada 33 SKPD yang mencakup 15 Dinas, 9 Badan, 1 rumah sakit, dan 8 kantor yang ada di SKPD Kota Palu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Ekuitas dana Tahun Anggaran 2014 pada Satuan perangkat kerja daerah (SKPD) kota palu rata-rata mencapai 30,12%, seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Ekuitas Dana

No.	Nama SKPD	Ekuitas Dana		Persentase Capaian (%)
		2013	2014	
1	Dinas Pendidikan	431.503.178.639,00	513.639.633.021,98	19,03
2	Dinas Kesehatan	65.591.139.147,24	83.581.363.861,72	27,43
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	156.101.032.186,88	190.672.867.291,33	22,15
4	Dinas Pekerjaan Umum	585.058.575.871,86	672.786.060.430,81	15,00
5	Dinas Penataan Ruang dan Perumahan	22.567.857.557,84	26.775.067.028,34	18,54
6	Dinas Pemadam Kebakaran	5.489.021.985,00	5.885.863.304,00	7,23
7	Bappeda dan Penanam Modal	3.508.590.484,00	4.180.752.125,00	19,16
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.578.943.444,33	13.964.703.005,78	62,78
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	39.190.151.245,00	44.534.523.371,18	13,64
10	Badan Lingkungan Hidup	6.590.487.863,00	7.631.740.539,00	15,80
11	Dinas kependudukan dan Cakil	2.351.025.105,00	2.761.977.109,00	17,48
12	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	6.069.200.826,00	7.187.375.674,00	18,42
13	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	1.679.131.395,00	1.894.550.151,00	12,83
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.549.999.066,00	4.010.153.014,00	57,26
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	771.075.359,00	1.282.753.051,00	66,36
16	Satuan polisi Pamong Praja	877.758.266,00	1.020.435.858,00	16,25
17	Sekretariat Daerah	99.548.487.982,00	122.264.508.168,00	22,82
18	Sekretariat DPRD	13.872.670.968,00	18.808.613.821,00	35,58
19	DPPKAD	25.127.659.044,57	24.288.676.302,29	(3,34)
20	Inspektorat	1.209.377.018,00	1.471.360.914,00	21,66
21	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	1.495.324.105,00	2.114.462.175,00	41,40
22	Badan Kepegawaian Daerah	1.342.326.068,00	1.887.077.622,00	40,58
23	Kecamatan Palu Selatan	1.301.816.700,00	1.444.693.194,00	10,98
24	Kecamatan Palu Barat	1.512.715.548,00	1.648.429.043,00	8,97
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.035.369.252,00	1.606.210.399,00	55,13
26	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	644.837.942,00	652.262.674,00	1,15
27	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	2.848.078.585,00	4.132.312.731,00	45,09
28	Badan Pemberdayaan Masyarakat	495.178.800,00	852.733.737,00	71,86
29	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	448.350.180,00	668.978.087,00	49,27
30	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan	40.302.719.174,00	46.385.360.737,97	15,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	7.595.633.015,00	100,00
32	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.422.073.028,00	3.601.097.395,00	5,23
33	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.308.549.592,75	23.307.382.139,02	62,89
Rata-rata		46.890.106.529	55.895.139.788	30,12

Sumber : Data Diolah, 2014

Analisi regresi Linear Berganda

Uji regresi dimaksudkan untuk menguji variasi dari alat model regresi linear berganda yang digunakan dalam menerangkan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas melalui pengaruh Belanja barang dan Jasa (X_1), dan Belanja Modal (X_2) terhadap Ekuitas dana dengan cara menguji kemaknaan dari koefisien regresinya. Berikut hasil pengujian hubungan antar variabel dengan menggunakan regresi linear berganda:

Tabel 4. Rangkuman hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	Thitung	Sig	Keterangan
(constant)	7,137	2,478	0,019	Signifikan
Belanja Barang dan Jasa (X_1)	0,022	0,113	0,910	tidak Signifikan
Belanja Modal (X_2)	0,725	6,322	0,000	Signifikan
R =	0,884			
R Square (R^2)	0,782			
F hitung =	53,872			
Sign. F	0,000			
$\alpha =$	0,05			

Sumber : Data diolah, 2014

Berdasarkan perhitungan diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut :
 $Y = 7,137 + 0,022 X_1 + 0,725 X_2$

Dari persamaan model regresi linear berganda diatas, terdapat nilai koefisien regresi variable bebas positif. Nilai koefisien X_1 dan X_2 bernilai positif artinya apabila terjadi peningkatan belanja barang dan jasa, dan belanja modal terdapat variabel X yang akan menyebabkan perubahan secara searah pada variabel Y (Ekuitas Dana). Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah:

1. Konstanta = 7,137 menunjukkan bahwa ekuitas dana sebelum adanya variabel independen yaitu belanja barang dan jasa dan belanja modal adalah sebesar 7,137 satuan.
2. Koefisien regresi $X_1 = 0,022$ menunjukkan bahwa apabila setiap variabel belanja barang dan jasa mengalami peningkatan 1 satuan maka akan berdampak pada ekuitas dana sebesar 0,022 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap atau tidak mengalami perubahan ($X_2=0$).
3. Koefisien regresi $X_2 = 0,725$ menunjukkan bahwa apabila setiap variabel belanja modal mengalami peningkatan 1 satuan maka akan berdampak pada ekuitas dana sebesar 0,725 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap atau tidak mengalami perubahan ($X_1=0$).

Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (belanja barang dan jasa, dan belanja Modal) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Probability* dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dari hasil perhitungan analisis Model Regression diperoleh F_{hitung} sebesar 53,872 dengan tingkat probabilitas 0,000 (Signifikan). Dengan nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa hipotesis dari penelitian ini dapat diterima kebenarannya yakni semua variabel independen yaitu belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu ekuitas dana.

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

- a. Nilai $t_{hitung} X_1 = 0,113$ dengan tingkat signifikan 0,910 pada taraf kesalahan 5% atau $p (0,910 > 0,05)$. Hal ini dapat menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa secara parsial mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap ekuitas dana sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b. Nilai $t_{hitung} X_2 = 6,322$ dengan tingkat signifikan 0,000 pada taraf kesalahan 5% atau $p (0,000 < 0,05)$. Berdasarkan hasil uji t ini menunjukkan bahwa belanja modal secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekuitas dana sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terhadap Ekuitas Dana

Berdasarkan hasil pengujian regresi diketahui terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap ekuitas dana. Hal ini

mengindikasikan bahwa baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal memiliki peran yang sangat penting yang akan mengakibatkan penurunan maupun penambahan nilai ekuitas dana setiap SKPD se Kota palu tahun 2014 tersebut. hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pengeluaran atau belanja yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya menurunkan dan menambah nilai ekuitasnya.

Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa besarnya Ekuitas dana setiap SKPD dominan dipengaruhi oleh jumlah pengadaan Belanja Modal yang berasal dari pengadaan aset tetap yang dapat menambah ekuitas dana dan dapat pula mengurangi ekuitas dana.

Jumlah Ekuitas Dana yang ada dalam setiap neraca SKPD tahun 2013 akan menjadi pembiayaan belanja tahun berikutnya yaitu tahun 2014. Dimana pembiayaan daerah tersebut sangat besar terdapat pada ekuitas dana investasi kemudian ekuitas dana lancar. Namun pada kenyataannya yang menjadi sumber pembiayaan utama dalam pembiayaan daerah adalah SiLPA yang ada di dalam neraca SKPD di tahun 2013 adalah sebesar Rp80.630.538.326,86 merupakan Silpa akhir tahun yang akan menjadi Silpa awal tahun 2014 yang dianggarkan dalam LRA tahun 2014 yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja daerah.

Dimulai dari pengalokasian alokasi belanja barang dan jasa dalam bentuk aset lancar seperti pembelian barang habis pakai yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dalam satu periode akuntansi yang diharapkan dapat membantu roda pemerintahan suatu daerah yang secara langsung menunjang kegiatan operasional SKPD. Sehingga dapat menambah dan mengurangi ekuitas dana setiap SKPD yang bersangkutan.

Begitupun dengan Belanja Modal, Ekuitas dana akan berkurang atau bertambah pada saat dilakukan belanja modal dalam

bentuk aset tetap seperti pembangunan infrastruktur yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup perekonomian daerah. Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian belanja modal tersebut, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Jika sarana dan prasarana publik telah terpenuhi dan dianggap memadai untuk dipergunakan oleh masyarakat maka pelaksanaan aktivitas sehari-hari dapat berjalan secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pula pada tingkat produktivitas masyarakat yang semakin meningkat. Selain itu infrastruktur yang memadai juga akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. semakin banyak investor yang menanamkan investasi di suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat. Dan secara otomatis pendapatan akan bertambah sehingga mempengaruhi ekuitas dana.

Sejalan dengan hasil, Abdul Halim (2002:73). Menyatakan bahwa Belanja Daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau deplesi, aset atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. sejalan dengan pendapat tersebut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002:85) mengemukakan bahwa "Belanja Daerah adalah penurunan manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva atau ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. Kedua pendapat ini menyatakan bahwa terjadi penurunan nilai ekuitas dana terhadap belanja barang dan jasa, dan belanja modal SKPD kota Palu.

Namun pada kenyataannya, jumlah ekuitas dana yang ada di 32 SKPD yang diteliti rata-rata meningkat setiap tahunnya

kecuali satu SKPD yang mengalami Penurunan Ekuitas Dana di tahun 2014 yaitu Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu. Ekuitas dana bertambah tiap tahunnya tergantung dari besar kecilnya belanja SKPD di tahun 2014 dan ekuitasnya juga berpengaruh terhadap besar kecilnya ekuitas dana di tahun 2013.

Pengaruh Belanja barang dan Jasa terhadap Ekuitas Dana

Dari hasil uji parsial yang dilakukan terhadap variabel belanja barang dan jasa terhadap variabel ekuitas dana pada SKPD Kota Palu diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel belanja barang dan jasa secara parsial mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap ekuitas dana pada SKPD kota palu.

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Belanja barang dan jasa juga sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pegawai dalam satu periode akuntansi dan apabila ada sisa akan menjadi cadangan persediaan di tahun berikutnya. Sehingga akan berpengaruh menambah dan dapat pula mengurangi ekuitas dana lancar di tahun 2014.

Ekuitas dana dari 33 SKPD se Kota Palu yang menjadi Sampel dalam Penelitian ini mengalami penambahan dan pengurangan Persediaan yang ada di neraca. Hal ini disebabkan karena persediaan yang merupakan aset lancar yang apabila ada sisa akan menjadi cadangan persediaan di tahun berikutnya.

R. Agus Sartono (2010;443): “Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor

penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Ditinjau dari segi neraca persediaan adalah barang-barang atau bahan yang masih tersisa pada tanggal neraca, atau barang-barang yang akan segera dijual, digunakan atau diproses dalam periode normal perusahaan”.

Pengaruh Belanja Modal terhadap ekuitas dana

Dari hasil uji parsial yang dilakukan terhadap variabel belanja modal terhadap variabel ekuitas dana pada SKPD Kota Palu diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekuitas dana pada SKPD kota palu.

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk membeli atau mengadakan atau membangun aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Belanja modal merupakan salah satu pengadaan aset tetap yang dapat menambah dan mengurangi ekuitas dana suatu SKPD. Itupun tergantung dari besar kecilnya ekuitas tahun 2013 dan besar kecilnya belanja modal tahun 2014 yang akan menambah atau mengurangi ekuitas dana tahun 2014. Tingginya belanja modal disebabkan pemerintah Kota palu masi memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Kegiatan masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana publik yang memadai. Oleh karena itu pemerintah kota palu berupaya menyediakan sarana dan prasarana publik yang memadai dan layak digunakan dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, irigasi, air bersih, gedung sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor-kantor dan lain sebagainya. Jika sarana dan prasana publik tersebut telah terpenuhi dan layak digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari, kesejahteraan masyarakat pun akan tercipta dengan baik juga akan mendatangkan investor yang akan melakukan kerjasama melalui investasi sehingga ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang

dapat menambah atau mengurangi ekuitas dana.

Bertambah atau berkurangnya suatu Ekuitas Dana tergantung dari banyaknya jumlah pengadaan belanja yang terjadi pada suatu SKPD dalam satu periode akuntansi. Dalam penelitian ini ada SKPD yang mencapai 100% Penambahan ekuitas dana di tahun 2014 yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini disebabkan karena Dinas tersebut baru terbentuk di tahun 2014 dan merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum sehingga belum membuat laporan keuangan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 karena masi melekat di Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan SKPD yang memiliki Ekuitas dana tetinggi terdapat pada badan Kesatuan Bangsa dan politik yaitu sebesar 66,36%. Penambahan ekuitas dana tersebut terdapat dari adanya Belanja terhadap aset yang cukup besar sehingga menambah ekuitas dana pada tahun 2014 sebesar Rp511.677.692,- dan walaupun ada penghapusan aset itu tidak terlalu berpengaruh terhadap berkurangnya ekuitas dana pada SKPD tersebut. Dinas Pendapatan Namun Sebaliknya, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu Mengalami penurunan Nilai Ekuitas dana pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena telah terjadi penghapusan aset tetap secara besar-besaran pada SKPD yang bersangkutan. Berikut tabel perkembangan Ekuitas dana seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Perkembangan Ekuitas Dana

No.	Nama SKPD	Ekuitas Dana		Persentase (Capaian %)
		2013	2014	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	771.075.359	1.282.753.051	66,36
2	DPPKAD	25.127.659.045	24.288.676.302	(3,34)
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	7.595.633.015	100,00
Rata-rata		8.632.912.139	11.055.688.127	54,34

Sumber : Data Diolah, 2014

Mulyadi (2001:591) aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai mamfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Sedangkan menurut Soemarso S.R (2005:20) aset tetap adalah aset berwujud yang masa mamfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki nilai yang cukup besar.”

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa terdapat penurunan nilai ekuitas dana yang diakibatkan oleh Belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada setiap SKPD di Kota Palu.
2. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap ekuitas dana (Survei pada SKPD se Kota Palu).
3. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel belanja barang dan jasa secara parsial mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap ekuitas dana (Survei pada SKPD se Kota Palu).
4. Berdasarkan hasil pengujian diketahui variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekuitas dana (Survei pada SKPD se Kota Palu).

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan belanja barang dan jasa diprioritaskan dalam penyusunan anggaran terutama untuk meningkatkan aset lancar yang menjadi penambah nilai ekuitas dana lancar pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
2. Diharapkan belanja modal diprioritaskan dalam penyusunan anggaran terutama yang dapat mendorong investasi di daerah serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat sehingga dapat sebagai penambah nilai asset pemerintah daerah.
3. Diharapkan pada peniliti selanjutnya untuk meneliti variabel lain yang ada hubungan dengan ekuitas selain variabel belanja barang dan jasa dan belanja modal yang mungkin dapat menambah nilai ekuitas suatu SKPD yang ada di kota palu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis akui bahwa dalam penulisan artikel ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, S.E., M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Ridwan, S.E., M.Si., Ak., AC. Semoga artikel ini dapat menjadi sumbangan yang bermamfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Idhamsya. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Tesis*. Palu. Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.

- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang* Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Daerah Kota Palu. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 dan peraturan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Fokusmedia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *tentang* Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang* Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang* standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Walikota Palu tentang Kebijakan Akuntansi Tahun 2011
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Cetakan ke-19. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Triharta, A.B, (2013), *Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua dengan Entri berpasangan : dilampiri dengan lampiran I PP 71 tahun 2010*. Edisi pertama, Graha Ilmu., Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 *tentang* Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *tentang* Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 *tentang* Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 *tentang* perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1956 *tentang* Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32
tahun 2004 *tentang* Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15
tahun 2006 *tentang* Badan Pemeriksa
Keuangan.